

Peran Badan Anggaran dan Pengawasan dalam Pembahasan Sistem Perubahan Anggaran

Karolina Mustika Elan Dua^{1*}, Emilianus Eo Kutu Goo², Nunsio Handrian Meylano³

^{1,2,3}Progam Studi Manajemen Universitas Nusa Nipa, Indonesia

Korespondensi penulis : karolinamustika21@gmail.com*

Abstract : *This research aims to find out the role of the budget and supervisory body in discussing the budget change system. To identify problems, this research uses qualitative research. Data collection techniques use interviews, observation and document study. It can be concluded that Budget changes are the process of adjusting previously approved budget allocations due to changes in conditions, priority needs, or realization of income and expenditure that is not in accordance with the initial plan. The budget change system refers to the mechanism that regulates how the government or organization implements the plan that regulates how the government or organization implements the agreed budget plan. Agreed budget. This process aims to align the budget with actual conditions, such as changes in economic assumptions, the reality of spending and revenues, or urgent needs.*

Keywords: Budget, Supervision, Budget Change

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran badan anggaran dan pengawasan dalam pembahasan sistem perubahan anggaran. Untuk mengidentifikasi permasalahan, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumen. Dapat disimpulkan bahwa Perubahan anggaran merupakan proses penyesuaian alokasi anggaran yang telah disahkan sebelumnya akibat perubahan kondisi, kebutuhan prioritas, atau realisasi pendapatan dan belanja yang tidak sesuai dengan rencana awal. Sistem perubahan anggaran mengacu pada mekanisme yang mengatur bagaimana pemerintah atau organisasi melaksanakan rencana yang mengatur bagaimana pemerintah atau organisasi melaksanakan rencana anggaran yang disepakati. Anggaran yang telah disepakati, Proses ini bertujuan untuk menyalurkan anggaran dengan kondisi aktual, seperti perubahan asumsi ekonomi, realitas belanja dan penerimaan, atau kebutuhan mendesak.

Kata Kunci: Anggaran, Pengawasan, Perubahan Anggaran

1. PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dan dapat berbentuk akademisi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas (Simatupang and Yuhertiana 2021).

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberi dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan dimaksud mempunyai fungsi Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD, Penyediaan dan pengordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada awal masa jabatan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Salah satu tugas Badan Anggaran adalah memberikan saran dan pendapat terkait pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Kepala daerah dalam mempersiapkan RAPBD, melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, memberikan saran kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyusunan belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menerapkan kinerja standar pada pencapaian untuk merancang sistem umpan balik informasi untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, dan untuk menerapkan telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya pemerintah telah digunakan secara efektif dan efisien mungkin guna untuk mencapai tujuan pemerintah.

Perubahan anggaran yang merupakan variabel moderasi menunjukkan hasil belum dapat memoderasi hubungan besaran anggaran dengan serapan anggaran belanja. Hal ini menunjukkan bahwa apabila kinerja keuangan SKPK (satuan kerja perangkat daerah) diukur dari perubahan anggaran akan memperburuk kinerja SKPK, sedangkan perubahan anggaran dapat memoderasi sisa anggaran tahun sebelumnya terhadap serapan anggaran belanja. Hal ini menunjukkan bahwa SKPK yang mempunyai sisa anggaran dan melakukan perubahan anggaran ternyata dapat mempercepat serapan anggaran (Aprilia, Nadirsyah, and Indriani 2024).

Perubahan anggaran dapat berupa penambahan dan pengurangan atas pendapatan, belanja, atau pembiayaan. *Rebudgeting* merupakan proses informal dan sulit dipahami. Terlepas dari adanya aturan dan prosedur untuk mengusulkan dan menyetujui revisi anggaran dalam sistem sektor publik manapun (Fahrinda 2022).

Perubahan dilakukan untuk menyesuaikan target kinerja, memperbaiki capaian kinerja, dan mengoreksi kebijakan yang tidak sesuai dengan perkembangan di lapangan. Seperti halnya penyusunan anggaran awal, penyusunan anggaran perubahan juga mengikuti pola dan mekanisme yang sama, namun relatif lebih tertutup dan misterius (Anessi-Pessina, et al., 2012). Agency atau SKPD adalah pengusul anggaran untuk masing-masing fungsi pemerintahan dan akumulasi dari usulan ini lah yang menjadi bahan untuk perancangan anggaran pemerintah daerah .

Dapat dinyatakan bahwa perubahan anggaran pemerintah daerah merupakan hal yang lumrah, karena merupakan hal yang rutin dilakukan oleh pemerintah daerah, setiap tahunnya, sebagai langkah dalam menjalankan penyesuaian anggaran. Perubahan yang terjadi selama proses pelaksanaan anggaran merupakan fenomena biasa yang terjadi pada pemerintahan daerah (AnessiPessina, E., Sicilia, M., & Steccolini, I. 2012). Perubahan atas setiap komponen APBD memiliki latar belakang dan alasan berbeda. Terdapat perbedaan alasan pada perubahan anggaran pendapatan dan pada perubahan anggaran belanja. Telah banyak penelitian yang dilakukan untuk mengungkap faktor- faktor yang berpengaruh dalam perubahan anggaran pemerintah daerah, diantaranya faktor sisa lebih perhitungan anggaran, pendapatan asli daerah dan dana perimbangan.

Dalam pembahasan anggaran, eksekutif dan legislatif membuat kesepakatan yang dicapai melalui proses tawar menawar sebelum anggaran ditetapkan sebagai suatu produk hukum (peraturan daerah atau Perda). Anggaran tetapan menjadi acuan bagi eksekutif untuk melaksanakan aktivitasnya dalam pemberian pelayanan kepada publik dan salah satu acuan bagi legislatif untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan penilaian

kinerja eksekutif melalui laporan pertanggungjawaban kepala daerah. Jumlah alokasi dana yang dapat direalisasi dalam belanja pemerintah daerah dinyatakan dalam dokumen anggaran satuan kerja (DASK).

Kode Rek	Uraian	Anggaran		Bertambah / Berkurang
		Sebelum Perubahan (RP)	Sesudah Perubahan (RP)	
4	PENDAPATAN DAERAH			
	Jumlah Pendapatan	Rp. 0	Rp. 0	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 36.954.893.275	Rp. 34.956.804.504	(1.998.088.711)
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp. 21.164.325.491	Rp. 20.655.761.601	(508.563.890)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 15.790.567.784	Rp. 14.301.042.903	(1.489.524.881)
5.2	BELANJA MODAL	Rp. 379.602.643	Rp. 101.602.771	(277.999.872)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 101.602.771	Rp. 101.602.771	0
5.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 277.999.872	Rp. 0	Rp. 277.999.872
	Jumlah Belanja	Rp. 37.334.495.918	Rp. 35.058.407.275	(2.276.088.643)
	Total Surplus/ (Defisit)	(Rp. 37.334.495.918)	(Rp. 35.058.407.275)	(2.276.088.643)

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Sekretariat DPRD Kab. Sikka TA. 2024

Gambar 1. Anggaran Satuan Kerja

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka berasal dari APBD Kabupaten Sikka. Terlihat pada Tabel 1.1 anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka semula Rp. 36.954.893.275,- mengalami perubahan menjadi Rp. 34.956.804.504,- atau berkurang senilai Rp. 1.998.088.711,-. Perubahan Anggaran selain untuk memenuhi pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran namun juga ada beberapa kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD yang tidak dapat memungkinkan dapat dilaksanakan, antara lain :Perjalanan dinas luar daerah, reses, Bimtek DPRD, Pengadaan PIN DPRD dikarenakan kondisi keuangan daerah yang belum baik.

Purwaningtyastuti (2014) meneliti tentang rasio anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah atas perubahan APBD. Ia menemukan bahwa selama tiga tahun pendapatan lain-lain yang sah mengalami perubahan anggaran yang paling besar. Perubahan belanja terbesar adalah perubahan anggaran belanja tak terduga. Adapun rasio realisasi pendapatan terhadap alokasi pendapatan pada APBD cenderung lebih besar dibanding realisasi terhadap perubahan APBD. Sedangkan rasio realisasi belanja terhadap perubahan APBD cenderung bernilai negatif, sedangkan rasio realisasi terhadap APBD bernilai positif atau melampaui alokasi belanja di awal tahun. Dengan demikian, perlu dilakukan perubahan anggaran agar tidak terjadi pelampauan anggaran.

Abadiarti (2014) meneliti pengaruh tingkat inkremental penganggaran awal, kondisi keuangan pemerintah daerah dan sosioekonomi lokal terhadap rebudgeting pada pemerintah daerah di Indonesia menemukan bahwa variabel kondisi keuangan yang diwakili oleh akumulasi surplus, aliran surplus, revisi surplus tahun sebelumnya dan sosioekonomi yang diwakili oleh area geografis berpengaruh terhadap rebudgeting. Untuk

variabel tingkat inkremental dalam proses penganggaran awal yang diwakilkan oleh perubahan belanja, perubahan belanja modal, dan perubahan belanja operasional, variabel kondisi keuangan yang diwakilkan oleh otonomi keuangan dan rigiditas pengeluaran, serta variabel sosioekonomi lokal yang diwakili oleh Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh terhadap rebudgeting.

Abdullah (2013) menyatakan bahwa perubahan pada anggaran pemerintah daerah di Indonesia, yang disebut anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya, karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan kebijakan anggaran berupa terjadinya pelampauan proyeksi pendapatan daerah, atau tidak tercapainya alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan pembiayaan yang berbeda dengan yang telah ditetapkan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, observasi dan studi dokumen. Dengan menggunakan metode kualitatif ini peneliti dapat mengetahui dan menggambarkan terkait perubahan anggaran yang terjadi pada bagian anggaran dan pengawasan. Kegiatan magang dilaksanakan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka di jl. El Tari Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka. Kegiatan magang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga analisis yaitu Reduksi data, Penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Anggaran mengidentifikasi perubahan anggaran yang memerlukan perhatian khusus melalui serangkaian langkah sistematis sebagai berikut:

a. Evaluasi Rincian Anggaran

Bagian Anggaran menilai pergeseran anggaran antar kegiatan dalam satu program, yang dilakukan berdasarkan optimalisasi penggunaan anggaran yang telah ada. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa setiap perubahan tetap sejalan dengan prioritas program yang telah ditetapkan.

b. Konsultasi dan Pembahasan

Dalam konteks perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Badan Anggaran mengadakan diskusi bersama pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Melalui dialog ini, mereka dapat setuju, menolak, atau meminta revisi atas perubahan anggaran yang diajukan.

c. Pemantauan Kebijakan dan Target Anggaran

Badan Anggaran juga menyerukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa perubahan anggaran selaras dengan kebijakan strategis pemerintah dan mencapai target yang realistis. Beberapa fraksi seringkali menyampaikan pendapat akhir terkait hal ini untuk memastikan akuntabilitas.

Melalui evaluasi menyeluruh dalam proses ini, Bagian Anggaran dapat mengidentifikasi perubahan anggaran yang bersifat mendesak dan strategis, memastikan bahwa prioritas utama tetap terjaga dan terfokus.

Pengawasan anggaran merupakan suatu bentuk tindakan untuk menjamin pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan tujuan dan rencana. Selanjutnya, berfungsi sebagai pedoman untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan anggaran pemerintah daerah dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Selain itu, bermanfaat untuk memastikan bahwa APBD digunakan sesuai dengan etika dan aturan hukum yang berlaku.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

KUA adalah dokumen yang disusun oleh Sekretaris Daerah dan disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai acuan awal dalam penyusunan APBD. KUA menguraikan visi, misi, program, dan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu, biasanya untuk satu tahun anggaran. Dalam KUA, terdapat arah kebijakan penggunaan anggaran yang berfungsi untuk mengarahkan alokasi sumber daya ke sektor-sektor yang dianggap strategis dan memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan daerah.

KUA mengandung beberapa elemen penting, seperti:

a) Visi dan Misi

Menjelaskan tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek pemerintah daerah dalam pembangunan.

b) Program dan Kegiatan Prioritas

Mengidentifikasi program-program utama yang akan dijalankan serta kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan tersebut.

c) Indikator Kinerja

Menetapkan parameter yang dapat diukur untuk menilai pencapaian tujuan pembangunan.

d) Alokasi Anggaran

Menggambarkan alokasi anggaran secara umum untuk masing-masing program dan kegiatan.

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

PPAS adalah dokumen yang merinci alokasi anggaran yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam KUA. PPAS menjadi panduan bagi lembaga legislatif dalam pembahasan dan pengesahan APBD. PPAS juga mencakup sumber pendanaan untuk setiap program dan kegiatan yang dapat berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain.

Dalam PPAS, terdapat beberapa poin penting, seperti:

1) Alokasi Anggaran

Merinci besaran anggaran yang dialokasikan untuk masing-masing program dan kegiatan. Alokasi ini didasarkan pada prioritas dan urgensi program tersebut.

2) Sumber Pendanaan

Menunjukkan asal usul dana yang akan digunakan untuk mendanai program dan kegiatan, termasuk sumber dana internal maupun eksternal.

3) Ketepatan dan Keseimbangan

PPAS harus memastikan bahwa alokasi anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, ada upaya untuk menjaga keseimbangan antara sektor-sektor yang berbeda.

Pentingnya KUA-PPAS dalam Penyusunan APBD

KUA-PPAS memiliki peran penting dalam penyusunan APBD yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan adanya panduan KUA, pemerintah daerah dapat fokus pada program-program yang memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. PPAS

membantu mengarahkan alokasi dana secara tepat, memastikan dana tersedia untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Perubahan anggaran merupakan proses penyesuaian alokasi anggaran yang telah disahkan sebelumnya akibat perubahan kondisi, kebutuhan prioritas, atau realisasi pendapatan dan belanja yang tidak sesuai dengan rencana awal.

Sistem perubahan anggaran mengacu pada mekanisme yang mengatur bagaimana pemerintah atau organisasi melaksanakan rencana yang mengatur bagaimana pemerintah atau organisasi melaksanakan rencana anggaran yang disepakati. Anggaran yang telah disepakati. Proses ini bertujuan untuk menyelaraskan anggaran dengan kondisi aktual, seperti perubahan asumsi ekonomi, realitas belanja dan penerimaan, atau kebutuhan mendesak. Proses ini bertujuan untuk menyelaraskan anggaran dengan kondisi aktual, seperti perubahan asumsi ekonomi, realitas belanja dan penerimaan, atau kebutuhan mendesak.

Badan Anggaran (Banggar) memiliki peran strategis dalam memastikan proses perubahan anggaran berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prioritas pembangunan. Peran tersebut meliputi evaluasi usulan anggaran, pengawasan pengelolaan keuangan, penyelarasan antara eksekutif dan legislatif, penerapan regulasi, penyediaan informasi publik, pemberian rekomendasi strategis, serta pengelolaan risiko fiskal. Dengan menjalankan fungsi-fungsi ini, Banggar tidak hanya menjaga keberlanjutan fiskal, tetapi juga memastikan bahwa perubahan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.

Saran

Sesuai dengan permasalahan yang di angkat yaitu tentang sistem perubahan anggaran dan juga mengenai kegiatan magang maka penulis memberikan saran-saran yang berkaitan dengan sistem perubahan anggaran dan juga pelaksanaan magang :

- Memperkuat Komite Khusus

Badan Anggaran memiliki kesempatan untuk memperkuat perannya dengan membentuk sub-komite atau kelompok kerja yang khusus memfokuskan perhatian pada pengawasan dan evaluasi perubahan anggaran. Langkah ini akan memudahkan

pemecahan anggaran yang kompleks, sehingga dapat dipahami dan dianalisis dengan lebih mendalam.

- Menggunakan Indikator Kinerja

Monitoring yang efektif harus didasarkan pada data melalui penggunaan indikator kinerja yang terukur. Evaluasi harus mencakup aspek efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap hukum dalam pelaksanaan anggaran.

- Meningkatkan Transparansi

Transparansi merupakan kunci dalam proses perubahan anggaran. Informasi mengenai perubahan anggaran harus disajikan dalam format yang mudah dipahami oleh semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat luas.

- Mengintegrasikan Teknologi Informasi

Penerapan sistem manajemen anggaran berbasis teknologi akan memungkinkan Badan Anggaran untuk memantau dan mengawasi perubahan anggaran secara real-time, sehingga mengurangi risiko penyimpangan.

- Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas

Penting bagi anggota Badan Anggaran untuk menjalani pelatihan secara berkala. Hal ini bertujuan agar mereka dapat memahami mekanisme pengawasan modern dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan publik yang baik.

Dengan strategi-strategi ini, Bagian Anggaran dapat memperkuat posisinya dalam memastikan bahwa setiap perubahan anggaran selaras dengan prioritas strategis, tanpa melanggar prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Tidak efektifnya pelaksanaan anggaran atau penyerapan anggaran akan banyak berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksa, A. F. (2023). Program peningkatan kemampuan mahasiswa menghadapi dunia kerja melalui kegiatan magang di Kantor Imigrasi dan Koperasi Sangosay Atambua. *Jurnal Umum Pengabdian Masyarakat*, 2(4), 50–56.
- Alfreda, A. A., & Goo, E. E. K. (2024). Analisis biaya operasional dan simpanan dalam memaksimalkan sisa hasil usaha pada KSP Kopdit Tuke Jung Nele. *AKUNTANSI* 45, 5(1), 30-43.
- Amalia, A., Nur, & Rokan, M. K. (2021). Tugas dan wewenang badan anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8510–8517(8510–17).

- Aprilia, O., Nadirsyah, N., & Indriani, M. (2024). Pengaruh besaran anggaran dan sisa anggaran tahun sebelumnya terhadap serapan anggaran belanja dengan perubahan anggaran sebagai pemoderasi pada SKPK Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 9(2), 90–98.
- Aquinaldo, T. N., Ghetta, A. P. K., & Juru, P. (2024). Analisis konsistensi perencanaan dan penganggaran serta implikasinya terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Sikka. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2), 3810-3814.
- Aswita, D. (2022). Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM): Inventarisasi mitra dalam pelaksanaan magang mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. *Prosiding Seminar Nasional Biotik*, 9(2), 56.
- Bhakti, Y. B., Rosmery Simorangkir, M., Tjalla, A., & Sutisna, A. (2022). Kendala implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di perguruan tinggi. *Research and Development Journal of Education*, 8(2), 783.
- Buu, A. L., Dekrita, Y. A., & Rangga, Y. D. P. (2024). Implementasi pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada KSP Kopdit Obor Mas Cabang Pasar Tingkat. *Jurnal Simki Economic*, 7(1), 156-167.
- Chuesta, R. N. B., Sanga, K. P., & Ghetta, A. P. (2024). Peran agency theory terkait manajemen risiko kredit dalam upaya meminimalisir kredit bermasalah pada KSP Kopdit Obor Mas Kanca Pasar Alok. *BUDGETING: Journal of Business, Management and Accounting*, 5(2), 1354-1359.
- Da Rato, E. Y., Dekrita, Y. A., & Aek, K. R. (2024). Analisis perencanaan laba dengan penerapan titik impas pada Perumda Air Wair Pu'an Kabupaten Sikka. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 25(2).
- Da Silva, Y. O., Temu, T. J., & Lamawitak, P. L. (2024). Knowledge management-based efforts to improve MSME performance (credit union intervention for MSME actors in Sikka Regency). *Dinasti International Journal of Education Management And Social Science*, 5(4), 429-434.
- Daud, A., Dj, A. A., Adianita, H., & Mado, Y. J. (2024). The influence of participative leadership style on job satisfaction with organizational citizenship behavior as a moderating variable. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(4), 2192-2200.
- Dekrita, Y. A., & Goo, E. E. K. (2024). Manajemen keuangan perusahaan teori & praktik. *Eureka Media Aksara*.
- Dekrita, Y. A., Afrianti, M., Della, M. F. C., Devance, M. R., Seka, G. F., Nunuhitu, P. C., ... & Bunga, M. A. V. (2024). Pentingnya pengetahuan dan kesadaran pajak bagi UMKM dalam rangka menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Desa Bangkoo, Kecamatan TaliburA. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(5), 9942-9947.
- Djohar Arifin, R. A. Rahman, & Restiani. (2022). *Sultra Law Review*, 4(April), 42–63.

- Elni, Y., Wellem, I., & Wulandari, C. A. (2024). Analisis proses pemberian pinjaman dalam mitigasi risiko kredit sebagai solusi kredit macet pada KSP Kopdit Pintu Air. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2), 3579-3585.
- Fahrinda, Y., & Cris, K. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan anggaran pada pemerintahan daerah. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 13(3), 499–456.
- Febronia, V., & Goo, E. E. K. (2024). Prosedur pengajuan dan realisasi kredit pada KSP Kopdit Hiro Heling Cabang Utama. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 11(2), 67-76.
- Florantino, A., Wellem, I., & Transilvanus, V. E. (2024). Efektivitas perencanaan penanganan dalam upaya percepatan pengentasan permukiman kumuh. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 563-568.
- Florida, M. I., Rengga, A., & Luju, E. (2024). Analisis anggaran kas dalam meningkatkan likuiditas pada KSP Kopdit Pintu Air Rotat Indonesia. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 5(2), 4358-4368.
- Goo, E. E. K. (2024). Pengaruh total assets turn over terhadap return on assets pada KSP Kopdit Pintu Air. *AKUNTANSI 45*, 5(1), 86-91.
- Hastuti, Y., Sanga, K. P., & Kurniawan, A. P. (2024). Implementasi sistem Daperma (PT. Pandai) pembayaran klaim asuransi dalam pelunasan hutang anggota meninggal dunia pada KSP Kopdit Obor Mas Cabang Pasar Tingkat. *BUDGETING: Journal of Business, Management and Accounting*, 5(2), 1280-1290.
- Listiana, Y., Prastiwi, L., Amrullah, I., & Fkip Universitas Soetomo. (2021). Pendampingan publikasi ilmiah bagi mahasiswa FKIP Universitas Dr. Soetomo. *INTEGRITAS: Jurnal Pengabdian*, 5(1), 122–134.
- Lorang, M. H. D., Obon, W., & Yulianti, M. (2024). Peran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Sikka. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2), 3682-3686.
- Mado, Y. J., Irwansyah, R., Kasnowo, K., Irdhayanti, E., & Khairunnisa, K. (2024). The influence of organizational culture on service quality with compensation as a moderate variable. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(2), 1638-1648.
- Maristela, T. N., Mitan, W., & Goo, E. E. K. (2024). Analisis strategi keunggulan bersaing usaha penjahit rumahan dengan pendekatan analisis SWOT: Studi kasus pada usaha jahit Ibu Mersi di Desa Habi. *Gemawisata: Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 20(2), 01-10.
- Mbado, M. R., Mbado, M., & Mbate, M. M. (2022). The influence of budget planning and implementation on budget realization with budget policies as intervening variable in Health Department of Kupang City. *Jurnal Inspirasi Ekonomi*, 4(1), 2503–3123.
- Noeng, A. Y., & Nuwa, C. A. W. (2024). Pengaruh quality of work life dan beban kerja terhadap kinerja karyawan KSP Kopdit Pintu Air Cabang Maumere. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 25(2).

- Nuwa, C. A. W., Luju, E., Wisang, I. V., & Fatima, T. A. (2023). Pengaruh pengelolaan dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Ilin Medo Kecamatan Waiblama. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(1), 705-713.
- Prayoga, R., Lubis, Z. T., & Dalimunte, A. A. (2022). Peran DPRD dalam mewujudkan fungsi pengawasan: Studi kasus Sekretariat DPRD Kabupaten Bedagai. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, 3(3), 380-388.
- Prilosadoso, B. H., Salampessy, M., Yahya, A. S., Afrizal, D., & Mado, Y. J. (2024). Socialization of improving the quality of public services through digital-based integrated village governance in villages. *Journal of Human and Education (JAHE)*, 4(4), 1025-1030.
- Rino, R. Y., Dekrita, Y. A., & Da Silva, Y. (2024). Peningkatan kapasitas perencanaan pada Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sikka. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(3), 5637-5652.
- Samsudin, S., Nurhalizah, N., & Fadilah, U. (2022). Sistem informasi pendaftaran magang Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 4(2), 324-332.
- Sangu, Y. F. E., Wellem, I., & Tonce, Y. (2024). Peran Kelitbangan dalam mendukung pembangunan ekonomi desa berbasis kajian di Kabupaten Sikka. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2), 4165-4169.
- Simatupang, E., & Yuhertiana, I. (2021). Merdeka Belajar Kampus Merdeka terhadap perubahan paradigma pembelajaran pada pendidikan tinggi: Sebuah tinjauan literatur. *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Ekonomi*, 2(2), 30-38.
- Sintiawati, N., Fajarwati, S. R., Mulyanto, A., Muttaqien, K., & Suherman, M. (2022). Partisipasi civitas akademik dalam implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). *Jurnal Basicedu*, 6(1), 902-915.
- Subu, F. K., Rengga, A., & Juru, P. (2024). Analisis rasio keuangan profitabilitas untuk menilai kinerja KSP Kopdit Pintu Air tahun 2017-2021. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 5(2), 4230-4238.
- Sugo, Y. N., Kurniawan, A. P., & Muda, V. A. (2024). Peran BAPELITBANG dalam upaya peningkatan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Sikka. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 345-354.
- Sumarwiyah, N., & Sandari, T. E. (2017). Analisis anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sebelum dan sesudah penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Kabupaten Jombang. *JEA17: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 2(02), 53-62.
- Syamsuadi, A., Sepriyani, H., Endrini, S., & Febriani, A. (2022). Implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Abdurrah pada program magang mahasiswa. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 1341-1348.

- Titin, T., Dilliana, S. M., Tonce, Y., Tanur, E. A., & Winarti, T. (2024). Increasing village community knowledge through socialization of the waste independent village program. *Journal of Human and Education (JAHE)*, 4(2), 262-268.
- Valentino, G. R., Rengga, A., & Nuwa, C. A. W. (2024). Peran Bapelitbang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di tinjau dari retribusi parkir daerah di Kabupaten Sikka. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2), 4159-4164.
- Wela, P. R., Dekrita, Y. A., & Aek, K. R. (2024). Peran Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Sikka melalui retribusi penjualan produk coklat Sikka pada unit pelaksana teknis Sikka Innovation Centre. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2), 3947-3951.
- Wisang, I. V., Transilvanus, V. E., & Mone, M. M. M. (2024). Pengaruh beban kerja dan stres kerja terhadap kinerja pegawai pada kantor Inspektorat Kabupaten Sikka. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(1), 82-88.
- Yacob, W., Dekrita, Y. A., & Mone, M. M. M. (2024). Peran rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Sikka dalam perencanaan pembangunan daerah. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2), 3952-3957.